PANDANGAN DUA ARAH DEMOKRASI PADA EFEKTIVITAS POLITIK IDENTITAS PEMILU DALAM PERSEFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM TATA NEGARA

Ianju Parlindungan¹, Kelvin Felix Vivano Emmanuelle², Radhitya Adji Saputra³,
Dhyavant Pramasthya Wicaksana⁴
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
e-mail: ianjuparlindungan@unnes.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pandangan 2 arah demokrasi dan pandangan hukum islam terkait politik identitas. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data dikelompokkan menjadi primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari buku, jurnal dan data sekunder dari artikel yang dipublikasikan di internet. Teknik pengumpulan data melalui tinjauan pustaka. Setelah itu data dikumpulkan, disajikan, dan kemudian kesimpulan yang ditarik. Hasil penelitian ini menyimpulkan politik identitas tidak sekedar adil fenomena Indonesia, sudah menjadi fenomena global. Identitas politik muncul sebagai reaksi atau respons terhadap ketidakadilan. Indonesia mempunyai sejarah tersendiri berakar sejak masa kolonial. Hanya saja politik identitas bisa berdampak positif dampaknya, bisa juga berdampak negatif. Solidaritas dan toleransi antar kelompok adalah dampak positifnya, sedangkan kecurigaan, konflik, dan perpecahan merupakan dampak negatifnya. Namun penelitian ini berpendapat bahwa penggunaan politik identitas Islam dalam bentuk apapun dan dosisnya tidak akan merugikan bangsa selama tidak menggunakan cara-cara yang ada bertentangan dengan konstitusi.

Kata kunci: . Demokrasi, Identitas, Politik

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara multikultural yang mana di Indonesia kita mendapatkan banyak keberagaman disini mulai dari budaya, etnis serta agama berbeda beda disini yang dicakup kedalam suatu wilayah, Dalam setiap lima tahun sekali kita dihadapkan dengan pesta demokrasi masyarakat Indonesia yang mana kita lam beberapa bulan yang lalu kita dihadapkan dengan pemilihan beberapa calon legislatif dan pemilihan presiden di tahun 2024, di dalam pesta demokrasi inilah kita diberikan hak berpendapat, hak memilih serta hak menyuarakan tanpa harus takut karena kunci dari negara demokrasi itu sendiri adalah kebebasan.¹

Seorang calon legislatif juga diberikan kebebasan dalam menarik suara masyarakat terutama calon presiden, mereka diberikan hak untuk berkampanye dan membentuk diri mereka dalam pandangan masyarakat agar mudah dikenali dan diketahui apa yang menjadi ciri khas pasangan mereka salah satu cara kampanye yang khas dalam pemilu yang sering di normalisasi adalah politik identitas, dalam setiap pemilu terutama dalam pemilu tahun 2019 dimulai pada tahun inilah politik identitas

¹ Khamdan, Muhammad. Wirdayani. 2018. MOBILISASI POLITIK IDENTITAS DAN KONTESTASI GERAKAN FUNDAMENTALISME, 194 Al-Tahrir, Vol. 18, No. 1 Mei 2018 : 193-218

semakin di gencar dan semakin menjadi salah satu alternatif pasangan legislatif menyuarakan kampanye mereka, salah satu bentuk politik identitas yang sering digunakan adalah politik identitas agama. Kita mengetahui bahwa negara Indonesia memiliki mayoritas umat beragama Islam paling banyak dari negara lain sehingga kita tidak dapat menyalahkan penggunaan politik identitas itu sendiri karena dalam Islam sendiripun pengaturan pemimpin juga diatur. Al-Farra menyatakan bahwa mereka yang dicalonkan mesti memiliki syarat-syarat antara lain: bersuku Quraisy (dalam konteks kekhalifahan); memiliki kriteria sebagaimana halnya qadhi yaitu merdeka, baligh, berilmu, dan adil; memiliki ketegasan dan kemampuan dalam peperangan, politik dan melaksanakan hukum tanpa terbawa oleh perasaan kasih sayang; memiliki kemampuan lebih dalam hal ilmu dan agama.²

Para ahli hukum dan politik memberikan persepektif berbeda mengenai politik identitas, contoh pandangan dari Ahmad Syafii Maarif yang mana dalam sudut pandangannya ia memandang politik identitas itu tidak ada keterkaitan pembahayaan dalam silsilah keutuhan suatu bangsa, karena unsur dari perjalanan sebuah negara itu berlandaskan dalam Pancasila, lima sila yang ada di Pancasila merupakan pedoman bagi suatu negara untuk tetap berdiri, tidak dengan suatu koalisi partai politik,

Pendapat lain dikemukakan oleh Siti Musda Mulia, dalam sudut pandangannya ia memandang bahwa Indonesia itu tidak dapat lepas dari politik identitas, terutama dalam politik identitas agama karena disini agama mayoritas menjunjung tinggi pemimpin yang berlatarbelakangkan agama Islam sehingga dalam peraturan pencalonan pemimpin Indonesia salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah beragama Islam.³ salah satu contoh bentuk politik identitas di Indonesia yang berasal dari partai politik adalah partai Ummat yang mana pendiri partai tersebut adalah Amien Rais, partai ini menjelaskan secara terang terangan bahwa penggunaan politik identitas dalam partainya akan terus dilakukan karena mereka berkeyakinan teguh bahwa politik identitas itu memberikan kemudahan yang baik dan tidak menyesatkan. Dalam sebuah wawancara berita ketua umum partai Ummat mengatakan bahwa politik jika tidak mengandung unsur agama di dalamnya maka akan menjadikan politik kehilangan arah. Persepektif yang diberikan ketua partai Ummat mendapatkan pandangan berbeda dari banyak partai yang sebagian besar menolak adanya politik identitas dalam pemilu karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari politik identitas tersebut.

Sehingga dalam penulisan ilmiah kali ini penulis akan membahas mengenai "Pandangan Dua Arah Demokrasi Terkait Efektivitas Politik Identitas Pemilu 2024 Dalam Persepektif Hukum Islam".

B. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini adapun penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian penelitian ini bisa mengkaji sebuah dokumen yang bersifat sekunder seperti misalnya peraturan perundang-undangan pemerintah, putusan dari

² Mubarak, Husni. 2018. Democracy, Identity Politics, and Social Cohesion: Opportunities and Threats of Dakwah Strategy in Countering Political Provocation in Indonesia, Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.II 2018

³ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2010

pengadilan atas sebuah kasus, teori hukum yang bersangkutan serta beberapa pendapat para peneliti sebelumnya. Penelitian normatif ini memaparkan data-data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber dengan bentuk kata-kata yang telah dirangkai. Pada penelitian ini adapun pendekatan yang di landaskan adalah pendekatan yang bersifat (conceptual approach) yang mana pendekatan ini berfokus pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan state (statute approach) yang mana pendekatan ini bertujuan untuk membahas mengenai pandangan hukum baik itu hukum islam maupun hukum positif dan regulasinya dalam dunia hukum. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan beberapa sumber baik dari buku, artikel dan jurnal-jurnal terbaru agar penelitian relevan. Setelah itu untuk menjawab hasil penelitian maka akan digunakan kerangka deduktif agar pertanyaan yang menjadi landasan penelitian bisa terjawab. Dalam penelitian kali ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang hukum islam dalam politik identitas.⁴

C. Pembahasan

1. analisa pandangan hukum islam terkait efektivitas politik identitas dalam pemilu 2024

Dalam sudut pandang teoritis, agama dan politik adalah dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak, mereka tumbuh beriringan dan akan tetap ada walau dalam keadaan apapun, agama dan politik diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, agama diibaratkan membagi pedoman mengenai ragam nilai yang wajib ditegakkan secara Undang Undang terutama yang berkaitan dengan persefektif hak dalam kehidupan manusia. Sedangkan politik adalah sebuah alat dalam merealisasikan nilai yang terkandung tersebut sehingga dapat diterapkan nilai nilai agama yang dijadikan sebuah pedoman tersebut, karena politik dianggap merupakan alat yang menjadikan pedoman tersebut terealisasi karena politik adalah sebuah sumber kekuasaan sehingga dengan adanya politik, agama dapat diterapkan dan jika tidak adanya agama maka akan sulit untuk merealisasikan keberagaman dan kepercayaan dalam masyarakat sekitar.

Politik identitas memang sudah ada sejak lama dan pertama kali di temukan di Amerika serikat tahun 80an, hingga saat ini politik identitas tersebut sering digunakan dalam berbagai negara untuk mencari keuntungan tersendiri dan memikat masyarakat. Politik identitas di Indonesia ada 2 macam yaitu politik identitas nasionalis dan politik identitas agamis, yang sering ditemukan di Indonesia adalah politik identitas agamis, hal ini banyak muncul di setiap pemilihan umum, dan paling banyak menyita perhatian umat pada saat itu adalah pemilihan gubernur antara Ahok dan Anies baswedan. Hal ini banyak menjadi kecaman publik karena menurut beberapa pakar hukum dan persefektif masyarakat politik identitas yang dijadikan Anies baswedan sebagai salah satu objek kampanyenya memberikan dampak negatif bagi lingkup sekitar bahkan pada saat itu juga umat antar agama terpecah belah karena masing masing membela agama yang menjadi pedoman agama mereka.

Dalam sudut pandang islam memilih pemimpin yang baik memang ditentukan dalam Al Qur'an dan Hadist, sehingga kita tidak dapat memisalkan umat islam

⁴ Saputro, Agus. 2018. AGAMA DAN NEGARA : POLITIK IDENTITAS MENUJU PILPRES 2019, Asketik Vol. 2 No. 2 Desember 2018 111-120

dari memilih pemimpin yang berlandaskan agama karena hal tersebut sudah ada di dalam pedoman agama seperti dalam surah at-taubah ayat 23:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا ءَاۤبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ
 اِنْ اَسْتَحَبُّوْا الْكُفْرَ عَلٰى الْاِيْمٰنِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi WALI (pemimpin/pelindung) jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka WALI, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS: At-Taubah [9]: 23)

telah disabdakan oleh Nabi SAW. Demikian pentingnya memilih pemimpin dalam Islam, mengingat posisi pemimpin itu strategis, menyangkut persoalan umat dan Bangsa. Sehingga kalau pemimpinnya benar-benar orang yang beriman dan bertaqwa, nilai-nilai Islam dan umat Islam dijalankan dan tidak tersingkir dari negerinya sendiri. Untuk itu penting bagi umat Islam memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, yang jelas identitas, terutama agamanya. Sebab terkadang ada orang yang tiba-tiba Islam saat musim pemilu, padahal aslinya dia bukan Islam, atau Islam tapi ketika pemilu saja, mereka itu adalah kelompok hipokrit.

Penggunaan politik identitas sebenarnya diperbolehkan asal tidak berlebihan, karena dalam pendapat KH. Nasaruddin Umar ia memberikan pendapat bahwa agama islam itu adalah agama yang adil, jadi sesuatu yang dilebih lebihkan dalam suatu hal tertentu juga tidak baik. Dalam Al Qur'an juga tidak memandang hal tertentu untuk dijadikan sebuah pemimpin contohnya pemimpin yang memiliki agama paling bagus atau yang hafalan Al Qur'annya paling banyak tidak ada diatur Al Qur'an untuk mereka adalah orang yang diistimewakan untuk memimpin karena Al Quran menjunjung nilai nilai yang tinggi pada rasa keadilan dan kebersamaan, sehingga tidak ada hal yang menjadi suatu ke khususan kecuali pemimpin yang harus beragama islam. Jika ada antara 2 pilihan yang satu agamanya paling taat tapi kinerjanya tidak begitu baik sedangkan yang satu lagi hanya baik agamanya secara wajib dan sunnah serta kinerjanya baik dalam memimpin maka tidak ada aturan dalam Al Qur'an harus memilih pemimpin yang lebih baik agamanya dari kinerjanya karena agama dalam dirinya bersifat individualis sedangkan negara bersifat banyak.

Sehingga jika sesuai syariat agama islam maka politik identitas diperbolehkan jika tidak ada unsur berlebihan dari penggunaannya, karena jika sutau hal berlebihan juga akan memberikan dampak negatif bagi agama itu sendiri. Seperti terpecahbelahnya umat lain, diskriminasi sosial, penistaan agama dan lain lain yang bahkan akan memberikan dampak buruk bagi agama kedepannya. Allah dan Rasulullah memang memerintahkan ummatnya untuk dapat memilih pemimpin yang beragama tetapi jika memandang dalam dikotomi hukum islam rasulullah juga memberikan aturan mengenai pemilihan pemimpin islam dari bangsa quraish

karena mereka terkesan bijaksana dan adil dalam memerintah sehingga dapat membawa negara kedalam kemakmuran dan kesejahteraan.⁵

2. Pandangan Dua Arah Demokrasi Terkait Efektivitas Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden 2024

Pandangan dua arah demokrasi yang dimaksud dalam hal ini adalah pandangan arah positif dan pandangan arah negatif terkait isu politik identitas. Dalam beberapa bulan yang lalu kita telah mengadakan pemilihan umum dan pesta demokrasi yang besar besaran untuk memilih dan mendukung calon pasangan presiden dan wakil presiden dalam kepemimpinan tahun 2024, banyak isu terkait politik mulai dari politik dinasti, kerusakan demokrasi, serta isu politik identitas juga ada dalam pemilu tahun 2024.

Terkait isu politik identitas masyarakat banyak yang mengira dan menuduh pasangan legislatif nomor urut 1 melakukan politik identitas yang memberikan efek negatif diantaranya adalah pemecahan belah umat, memberikan pandangan kebencian terhadap paslon lain dan banyak efek negatif lainnya sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengecam terkiat penggunaan politik identitas yang berlebihan yang dilakukan oleh pasangan ini.

Schumpeter menekankan bahwa demokrasi adalah proses kompetisi untuk menemukan kepemimpinan politik. Jadi, tujuan akhir berupa pelayanan untuk memenuhi kehendak dan harapan publik hanya diperoleh melalui kompetisi yang sehat dalam memperoleh kepemimpinan politik, orang yang dengan kekuasaannya mengambil keputusan-keputusan politik. jika kita memandang dalam sudut demokrasi bahwa Kepemimpinan politik dalam demokrasi sejatinya menggambarkan kehendak rakyat yang diamanatkan kepada seorang pemimpin. Sikap, perilaku, dan keputusan seorang pemimpin, kepala negara atau daerah, dalam demokrasi pada dasarnya mencerminkan wajah para pemilihnya. Singkatnya, Schumpeter menekankan pada aspek yang lebih empiric pada proses sebelum mendiskusikan hasil atau tujuan.

Jika kita memandang dalam sudut demokrasi bahwa politik identitas tersebut justru diperbolehkan karena tujuan dasarnya adalah menciptakan persepsi baik publik terhadap mereka yang menjadi permasalahan dalam setiap pemilu terkait politik identitas adalah penggunaan politik identitas yang berlebihan yang menjadikan banyaknya efek buruk seperti memandang sebuah agama lebih superior dari agama lainnya sehingga bukan hanya mendapat pandangan negatif dari agama lain bahkan ini juga mendapatkan pandangan negatif dari golongan sesama sendiri, politik identitas justru baik digunakan untuk mejadi satu bentuk identitas saja tidak secara berlebihan sehingga jika penggunaan politik identitas secara berlebihan akan membahayakan demokrasi yang menjadikan melemahnya dmeokrasi karena memilih bukan berdasarkan gagasan atau kinerja melainkan hanya berpedoman kepada keagamaan saja. Ini meruakan hal yang tidak diperbolehkan dalam memilih pemimpin yang menjadikan lemahnya demokrasi, sehingga dari hal ini dapat disimpulkan bahwa jika penggunaan politik identitas memiliki takaran yang baik maka akan memberikan hal yang baik juga terhadap suau paslon karena kta

⁵ Khadmad, Dadang. 2011. Sosiologi Agama: Potret Agama Dalam Dinamika Konflik, Pluralisme Dan Modernitas. Bandung: Pustaka Setia

mengetahui bahwa agama tidak dapat dipisahkan dalam politik, tetapi jika digunakannya politik identitas secara berlebihan maka akan menyebabkan terpecahbelahnya umat yang merusak identitas bangsa sebagai pancasila sehingga maka akan banyak konflik dimana mana terkait perbedaan pilihan dalam calon pasangan sehingga itu baiknya dalam mencalon menggunakan agama sebagai identitas harus sesuai takaran dan tidak berlebihan untuk menciptakan pancasila dan demokrasi masih sesuai landasan negara.

Indonesia merupakan negara dengan ruh kerohanian yang diagungkan. Terlihat dari Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa, memposisikan Tuhan (Agama) dalam tingkatan pertama dan utama melandasi empat sila berikutnya. Serta tidak lengkap rasanya menata Indonesia dengan Pancasila saja, semboyan luhur Bhineka Tunggal Ika harus melengkapi. Negara Indonesia saat ini dihadapkan dengan krisis persatuan. Banyak individu atau kelompok pandai berbicara keragaman "Bhineka", tetapi lupa akan persatuan "Ketunggal Ika-an". Indonesia memiliki agama yang beragam, dan agama tidak terlepas dari kehidupan bernegara melalui aktivitas berpolitik. hubungan otoritas agama dengan otoritas negara saling bersinergi. Otoritas negara harus mendasarkan kebijakan pada konstitusi. Otoritas negara tidak hanya sekesar ada, tetapi juga berusaha membawa negara mengikuti aturan konstitusi.⁶

Politik Hukum Tata Negara Dalam Konsep Dan Konteks Pancasila dan Kebhinnekaan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Politik hukum tata negara dalam konsep dan konteks Pancasila dan Kebhinnekaan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkesesuaian dengan teori kebangsaan yang diuraikan oleh Hans Kohn dan Ernest Renan, serta teori geopolitik dari Frederick Ratzel yang mengulas bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan Dasar Negara dan Semboyan pemersatu bangsa dan merupakan dasar dari pemikiran bangsa dan sendi hukum yang paling dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu semboyan bhinneka tunggal ika merupakan kebudayaan luhur bangsa Indonesia dari zaman nusantara raya. Teori Hukum atau Stufenbou Theory dari Hans Kelsen menempatkan bahwa UUD 1945 sebagai Konstitusi dasar negara pun merupakan penjabaran dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sering juga disebut way of life. Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi penunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas hidup dan kehidupan didalam segala bidang. Ini berarti semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila karena Pancasila sebagai weltanschauung selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain:

1. Jiwa keagamaan. Ini sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila ketuhanan yang maha esa;
2. Jiwa yang berperikemanusiaan. Ini sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Jiwa kebangsaan. Sebagai perwujudan dari sila persatuan Indonesia;

⁶ Rohmah, Wardhatul. Naflah Sulfa 2020. Ulama Dan Penguatan Politik Identitas Persefektif Al Qur'an, REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 1, No. 2, November 2020

4. Jiwa kerakyatan. Menjadi sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5. Jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Sebagai manifestasi/perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan serta sikap hidup seluruh masyarakat Indonesia.

Sehingga untuk memenuhi dan agar dapat terpenuhinya hal ini maka politik identitas tidak dapat disarankan jika digunakan terlalu berlebihan karena merusak system hukum bangsa, dalam hukum tata negara berpegang teguh kepada kebhinekaan tunggal ika yang melandaskan pada pancasila yang mana pancasila sendiri menggabungkan banyak hal yang berbeda di Indonesia menjadi satu kesatuan berbentuk negara yang aman walaupun banyak keyakinan dan kepercayaan berbeda sehingga jika memihak satu hal yang menjuru kepada politik identitas sangat disayangkan karena jika dianggap digunakan terlalu berlebihan dalam kalangan masyarakat maka akan menjadikan suatu kelompok baik itu agama, etnis, suku dan lain lain merasa terintimidasi jika ada ke khususan tersendiri yang dilakukan oleh pemerintah.⁷

D. Penutup

Dalam pandangan hukum islam penggunaan politik identitas tidak pernah dibahas dalam Al Qur'an sehingga kebolehan dan ketidakbolehan penggunaannya masih simpang siur, sehingga itu banyak ahli yang menggunakan persepektif berbeda dalam pengrtian politik identitas. Maka dalam hal itu penggunaan politik identitas sudah ada sejak dahulu bahkan sejak awal muncul di amerika tahun 80an penggunaan politik identitas terus menjalar ke berbagai negara terutama ke Indonesia, dalam hal itu penggunaan politik identitas secara demokrasi sama sekai dibolehkan seperti partai ummat milik Amien Rais yang mana mereka menegaskan penggunaan politik identitas dalam partai mereka tidak akan pernah hilang karena mereka menganggap bahwa politik tanpa agama merupakan hal yang tidak baik dalam suatu negara sehinggadibutuhkan politik identitas agar agama tidak hilang dalam politik. Menurut pandangan penulis penggunaan politik identitas secara berlebihan yang mendatangkan ketidakbaikan bagi negara dan merusak demokrasi sehingga politik identitas jika dalam skala berlebihan akan mendatangkan perpecaha dalam negara sendiri terutama Indonesia yang berlandaskan pada pancasila.

⁷ Santoso, Rudi. & Agus Hermanto. 2020. ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA NEGARA (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia), NIZHAM, Vol. 8, No. 01 Januari-Juni 2020

Daftar Pustaka

Buku:

- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2010
- Khadmad, Dadang. 2011. Sosiologi Agama: Potret Agama Dalam Dinamika Konflik, Pluralisme Dan Modernitas. Bandung: Pustaka Setia

Karya Ilmiah:

- Ardipandanto, Aryojati. 2020. The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective , *Politica* Vol. 11 No. 1 Mei 2020 43-64
- Khamdan, Muhammad. Wirdayani. 2018. MOBILISASI POLITIK IDENTITAS DAN KONTESTASI GERAKAN FUNDAMENTALISME, 194 *Al-Tahrir*, Vol. 18, No. 1 Mei 2018 : 193-218
- Mubarok, Husni. 2018. Democracy, Identity Politics, and Social Cohesion: Opportunities and Threats of Dakwah Strategy in Countering Political Provocation in Indonesia ,*Jurnal Bimas Islam* Vol.11. No.II 2018
- Rohmah, Wardhatul. Naflah Sulfa 2020. Ulama Dan Penguatan Politik Identitas Persepektif Al Qur'an, *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 1, No. 2, November 2020
- Saputro, Agus. 2018. AGAMA DAN NEGARA : POLITIK IDENTITAS MENUJU PILPRES 2019, *Asketik* Vol. 2 No. 2 Desember 2018 111-120
- Santoso, Rudi. & Agus Hermanto. 2020. ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA NEGARA (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia), *NIZHAM*, Vol. 8, No. 01 Januari-Juni 2020